

FUNGSI BUDAYA MONARKI DALAM PEMBELAJARAN PENGUATAN IDENTITAS NASIONAL: TINJAUAN JEPANG DAN INDONESIA

Maemunah Sa'diyah, Rofiah
Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia
maemunah@fai.uika-bogor.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengungkap manfaat budaya monarki dalam upaya penguatan identitas nasional melalui fungsi simbolisasi raja. Menggunakan studi kasus monarki di Indonesia dan Jepang, menggali bagaimana raja-raja menjalankan perannya ditengah masyarakatnya menunjukkan bahwa keberadaan raja sebagai symbol utama suatu budaya monarki dapat memperkuat pengaruh nilai-nilai budaya dalam memandu dan menjaga kehidupan masyarakat budaya tersebut. Hal ini dapat menjadi suatu strategi pembelajaran dalam upaya penguatan identitas nasional. Perbandingan peran raja di Indonesia dan jepang menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dan kelebihan dalam pengupayaan penguatan identitas nasional. Oleh karena itu saling mempelajari kelebihan dan kekurangan dari kedua Negara dapat memperbaiki dan mengembangkan makna dan implementasi identitas nasional yang lebih berdaya guna bagi eksistensi Negara.

Kata kunci: Kekaisaran Heisei, Kasultanan Hamangkubuwana, Kasunanan Pakubuwana, Bushido, semangat kejuangan

Pendahuluan

Permasalahan Identitas Nasional semakin mengemuka di era globalisasi ini. Dalam tinjauan para pakar, pada kasus Indonesia terwujud dalam perilaku meniru budaya asing yang datang, tanpa ada filter terlebih dahulu perihal yang baik dan pantas ditiru dengan yang buruk yang seharusnya ditinggalkan. Masyarakat Indonesia terutama kaum muda melenial mengalami apa yang disebut kebebasan yang membingungkan, dimana dampak ekstrimnya adalah hilangnya jati diri, yang berarti pula hilangnya pijakan pada apa yang benar dan baik, pantas dan tidak pantas dalam ukuran social budaya masyarakat Indonesia (Mulyana, 2017). Hal ini mengakibatkan kaum muda terasing dari lingkungan kehidupan social nyata dan hidup dalam imajinasi budaya yang serba modern dan global, namun semu dalam dampak social budaya, bahkan ekonomi para penganut budaya global tersebut (Hariyono, 2017).

Pada kasus Jepang, akibat fasisme ekstrim sebagian masyarakat Jepang, penolakan pada budaya asing diekspresikan secara berlebihan. Dalam kasus budaya korea yang masuk ke Jepang misalnya, demonstrasi yang dilakukan sebagian rakyat Jepang sejak 2010, dan mencapai puncaknya pada 2013 dimana isu proteksi budaya asing, melebar pada menajamnya perebutan sebuah pulau oleh kedua Negara (Haq, 2016). Fanatisme masyarakat Jepang akan keunggulan budayanya membawa mereka pada sikap menyalahkan budaya lain (korea) ketika globalisasi memberikan dampak negative pada pertumbuhan ekonomi Jepang (Kang, 2014).

Ragam permasalahan yang muncul dari peran dan fungsi Identitas nasional terutama dalam menghadapi era globalisasi ini menunjukkan pentingnya suatu rujukan yang dapat menstandarisasi makna identitas nasional itu sendiri. Hal ini agar kekurangan atau kelebihan dalam memaknai identitas nasional dapat diatasi, diperbaiki dan dikembangkan.

Penelitian-penelitian terdahulu terkait budaya mengungkapkan makna, keunikan, dan problematika seputar kehampiran budaya. Mengkaitkan budaya dengan penguatan identitas nasional sudah ada namun masih berupa konsep belum menunjukkan alur prosesnya

Dengan menggunakan metodologi kualitatif, Penelitian ini bertujuan menganalisa problematika identitas nasional dengan mengambil studi kasus di Indonesia dan Jepang, dan menggali solusi melalui peran dan fungsi Raja yang ada di

kedua Negara yang berfungsi sebagai symbol pemersatu rakyat. Data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara mendalam serta dokumen-dokumen kepustakaan. Validasi data menggunakan triangulasi data, hasil wawancara dan pengamatan. Penelitian ini menggunakan teori symbol yang dipopulerkan oleh Dillistone (2002).

Symbol adalah perlambang atau tanda dimana pola-pola pengungkapan akan sesuatu tercakup dan tergambar pada symbol tersebut (Dillistone 2002). Menurut Soekanto (2011) budaya merupakan salahsatu yang memproduksi symbol. Diantara model-model social yang pernah berkembang disepanjang sejarah manusia adalah kehidupan social berdasarkan budaya system kerajaan atau monarki. Dalam system budaya ini Raja menjadi pusat budaya disuatu masyarakat monarki (wardani, 2012). Artinya Raja merupakan symbol dari bagaimana suatu budaya mengungkapkan pola-pola makna dan fungsinya dalam suatu kehidupan bermasyarakat.

Pada kenyataan social masyarakat monarki modern, belum adanya definisi dari kata symbol pemersatu rakyat, menyebabkan kebingungan akan peran raja bagi kaisar Akihito, dan ambinguitas kewenangan yang seringkali mendapat gugatan keabsahannya pada Sultan Hamengkubuwana di Yogyakarta dan Sunan Pakubuwana di Surakarta. Oleh karena itu penelusuran kiprah para raja ini di perlukan untuk memetakan sejauh mana peran dan fungsi sebagai symbol pemersatu rakyatnya di implementasikan dan seberapa jauh dampaknya bagi keterbentukan identitas nasional yang diperlukan rakyatnya dalam menghadapi arus globalisasi.

Hasil dan Pembahasan

Mengupas Peran kaisar Akihito menuju Jepang yang lebih terbuka.

Kaisar Akihito akan turun tahta pada 30 april 2019 lalu. Dalam pidato peringatan 30 tahun masa kekaisarannya, kaisar menyampaikan bahwa selama menjalankan tugas kekaisaran, dirinya terus menerus merenungkan bagaimana seharusnya seorang kaisar memerankan diri sebagai symbol pemersatu bangsa Jepang (kompas, 24-02-2019). Monarki Jepang telah mengalami perubahan fungsi pada masa kekaisaran Hirohito pasca perang dunia II, dari pemegang kekuasaan absolut menjadi symbol pemersatu bagi rakyat Jepang (Sakamoto, 1982). Sejak saat itu fungsi monarki di Jepang berada dalam pencarian bentuk dalam berkontribusi bagi negara Jepang (Mulyadi, 2017). Kaisar Hirohito mengambil peran memulihkan mental bangsanya

pasca mengalami kekalahan dalam perang dunia II, dan mendorong kebangkitan ekonomi Jepang yang diporakporandakan perang. Peran ini dianggap berhasil membawa Jepang menuju perbaikan ekonomi, hingga Jepang berhasil memperbaiki negerinya pasca perang dalam waktu yang cukup singkat (Tsunenari dkk, 2007).

Pada masa kaisar Akihito peran yang dijalankannya adalah dalam urusan diplomatic. Kondisi rakyat Jepang saat itu yang telah mulai pulih dari trauma perang disatu sisi, dan tengah bangkitnya perekonomian Jepang disisi lain. Hal ini dalam pandangan kaisar adalah waktu yang tepat dalam upaya membangun persahabatan dengan Negara-negara tetangga Jepang, dimana banyak diantaranya adalah negara bekas musuh dan jajahan Jepang pada masa penjajahan (Mulyadi, 2017). Dalam upaya memenuhi peran yang diambilnya ini kaisar melakukan tur ke berbagai Negara dalam rangka menjalin persahabatan, bahkan kaisar tak segan-segan untuk meminta maaf pada Negara-negara bekas jajahan Jepang serta menunjukkan keprihatinan atas tragedy perang. Misi keterbukaan Jepang yang dibangun oleh kaisar bukan saja pada luar negeri Jepang, namun juga didalam negeri Jepang itu sendiri. Dalam tradisi kerajaan Jepang, Kaisar pada masa sebelumnya tidak pernah tampil di muka umum, kaisar Akihito memilih untuk tampil dihadapan rakyatnya, bahkan bersama-sama rakyat Jepang, kaisar turut berkontribusi dalam menghadapi bencana alam yang terjadi di Jepang seperti gempa bumi pada tahun 1995 dan 2011. Hal ini membuat kaisar Akihito kemudian dikenal sebagai raja yang dekat dan dicintai oleh rakyatnya daripada seorang raja yang mewarisi mitos kedewaan yang jauh (Albab, 2011).

Jepang yang Hemogen dan Jepang yang Lebih Terbuka, Sebuah Pelajaran

Dinamika yang cukup luar biasa dialami Negara Jepang terutama pasca kekalahan perang dunia II yang dideritanya. Politik Isolasi Negara dan Kebanggaan Jepang atas homogenitas bangsa Jepang dimana hal ini membawa Jepang pada keteguhan berpijak pada jatidiri nasionalnya, disatu sisi berdampak pada rakyat Jepang yang sangat mencintai dan bangga akan negaranya. Hal ini selanjutnya tercermin dalam keteguhan rakyat Jepang dalam mempraktekkan tradisi-tradisi budayanya serta mengaplikasikan nilai-nilai budayanya kedalam kehidupan keseharian rakyat Jepang. Dunia kemudian mengenal budaya “bushido”, “matsuri”, “chato dan nodate”, dll sebagai tradisi-tradisi yang mencerminkan watak masyarakat Jepang. Keteguhan,

kebanggaan dan kecintaan akan apa yang dimiliki ini diyakini dapat membentengi Jepang dari arus globalisasi yang salahsatu dampak negatifnya adalah terjadinya kebingungan identitas. Disisi lain fasisme yang berkembang di Jepang dan semakin menguat pasca kemenangan Jepang pada perang dunia I telah mengantarkan Jepang pada kehancurannya di perang dunia II (Hotta, 2014). Adalah semangat “Bushido” yang menjadi nilai budaya utama dimana sepakterjang Jepang menghantarkan pada kemenangan Jepang pada perang duania I, dan nilai budaya ini pula yang menjadi pondasi kebangkitan Jepang pasca kehancuran Jepang akibat kekalahan pada perang dunia II (Sugimoto, 2010, Suliyati, 2015).

Etika Bushido dalam perkembangannya, selain memiliki arti sebagai jalam kesatria, juga berarti tanggung jawab, kesetiaan, kerelaan berkorban, sopan santun, tatakrama, disiplin, pengabdian, kerjakeras, kebersihan, hemat, kesabaran, ketajaman berpikir, kesederhanaan, kesehatan jasmani dan rohani, kejujuran, pengendalian diri (Tsunenari, dkk, 2007).

Di antara kenyataan-kenyataan inilah Kaisar Akihito mengembangkan konsep peran yang akan diambilnya demi kemajuan Jepang dimasa selanjutnya. Hal ini tertuang dalam pidato kaisar pada perayaan 30 tahun kekaisarannya. “Negara kita telah mengembangkan kebudayaannya sendiri sebagai sebuah Negara kepulauan. Karena dunia telah semakin mengglobal, maka saya pikir kita sekarang dituntut untuk lebih terbuka terhadap dunia luar, membangun posisi kita sendiri dengan bijaksana dan membangun hubungan dengan Negara lain secara tulus” (kompas, 24.2.2019). Problematika demonstrasi rakyat Jepang menolak masuknya kebudayaan asing ke Jepang yang terjadi baru-baru ini, sementara semakin terbukanya gugatan perlakuan rasis Jepang terhadap kaum minoritas yang ada di Jepang, merupakan tantangan-tantangan yang harus diselesaikan, jika peran yang diambil Kaisar diharapkan untuk memandu Jepang memasuki era keterbukaan.

Peran Raja Daerah dalam Membangun Identitas Indonesia, Pelajaran yang lain.

Jika dinamika fungsi kekaisara Jepang membawa negerinya pada era keterbukaan dan mengakhiri masa menutup diri, maka yang dibutuhkan Indonesia dari peran kerajaan adalah sebaliknya. Watak Indonesia yang terbuka sejak semula adalah buah dari pengalaman interaksi dengan kekayaan etnik dan budaya yang dimilikinya.

Keberhasilan interaksi antarbudaya di Indonesia secara garis besar menghasilkan kesetaraan antar budaya-budaya yang hidup di Indonesia. Di Indonesia tidak ada suku yang lebih unggul dari yang lainnya yang memungkinkan diskriminasi terjadi dengan latarbelakang perbedaan budaya etnik. Kesetaraan ini selain mengakibatkan pertukaran budaya terjadi dan menjadi kekayaan buday nasional, juga menjadikan antar etnik tidak secara fanatic mengagungkan kebudayaannya dan meremehkan atau menomorduakan yang lainnya. Stabilitas social di Indonesia lahir dari kondisi ini (Rofi'ah, 2012).

Namun menghadapi era keterbukaan dunia, watak rakyat Indonesia yang terbuka terhadap berbagai kebaruan, memungkinkan sisi negative hilangnya identitas nasional terjadi. Hal ini membutuhkan kerekatan di tingkat local dan nasional dalam upaya penguatan identitas nasional bangsa Indonesia menghadapi arus globalisasi.

Raja sebagai symbol pemersatu rakyat, juga menjadi tugas bagi raja-raja daerah yang ada di Indonesia. Dalam upaya memenuhi tugas ini kerajaan Yogyakarta atau lebih di kenal dengan sebutan kraton kasultanan Yogyakarta dan kerajaan Surakarta yang lebih dikenal dengan sebutan kraton kasunanan Surakarta, mengkonstruksi makna simbolisme raja melalui peristiwa sejarah. Menghargai proses sejarah bangsa dapat menjadi salahsatu cara menggugah rasa identitas nasional (Setianto, 2012). Dalam konteks Indonesia, sejarah terbagi dua yaitu sejarah nasional dan sejarah kelokalan. Beragamnya sejarah local mengharuskan keintegrasian sejarah local pada sejarah nasional jika ingin identitas nasional dapat terbangun dengan baik dan benar. Keterhubungan sejarah local dengan sejarah nasional terkadang bersifat timbalbalik (Hariyono, 2017) dalam konteks Yogyakarta dan Surakarta, selain kesejarahan dibangun pada masa penjajahan hingga kemerdekaan Indonesia seperti perang diponegoro, serta moment bergabungnya kerajaan Yogyakarta dan kerajaan Surakarta kedalam kesatuan republic Indonesia, sejarah dimana Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Negara menggantikan Jakarta yang jatuh ketangan Belanda kala itu, adalah masa dimana identitas kelokalan Yogyakarta dan Surakarta terintegrasi pada identitas Nasional Indonesia. Perjuangan heroik masyarakat Yogyakarta dan Surakarta bersama segenap pejuang bangsa Indonesia dalam peristiwa serangan 1 maret 1949 sebagai momen mempertahankan ibu kota, menjadi ingatan bersama tentang semangat kejuangan yang menghantarkan pada kemenangan mempertahankan kemerdekaan. Momen ini berhasil menegaskan harga diri bangsa sekaligus jati diri rakyat Indonesia.

Tingginya apresiasi terhadap nilai sejarah dalam peristiwa ini dibuktikan dengan dijadikannya peristiwa tersebut sebagai dasar bagi Yogyakarta dan Surakarta dalam menyusun identitas warganya sebagaimana tertuang dalam naskah peraturan daerah tentang tata nilai budaya Yogyakarta (2011) dan dalam peraturan daerah Surakarta tentang cagar budaya (2013).

Identitas yang dibangun yang berkaitan langsung dengan sejarah serangan 1 maret 1949 adalah perihal konsep tatanilai kejuangan dan kebangsaan rakyat Yogyakarta (perda DI Yogyakarta, 2011) dan perihal nilai penguatan budaya dan identitas nasional rakyat Surakarta (perda kota Surakarta, 2013). Semangat kejuangan mengandung makna tertanamnya kesadaran akan tujuan hidup tertinggi, yang melampaui tujuan-tujuan yang bersifat material, parsial, dan jangka pendek. Dan dicirikan oleh dampak sosialnya yang menyeluruh bagi semakin banyak orang. Internalisasi nilai perjuangan meraih kemerdekaan bangsa Indonesia melalui budaya kejuangan pada setiap diri masyarakat Yogyakarta dan Surakarta, membangkitkan keberhargaan diri dan jati diri nasional masyarakat Yogyakarta dan Surakarta sebagai bangsa Indonesia yang bermoral dan bertanggungjawab. Berjuang demi tanahtumpah darah adalah bentuk moral berbangsa dan bernegara bagi setiap manusia Indonesia, bertanggungjawab adalah untuk tidak membiarkan nilai-nilai luhur itu terkontaminasi oleh apapun yang akan melemahkannya, baik dari internal masing-masing individu rakyat Indonesia itu sendiri maupun dari eksternal budaya dan Negara Indonesia (Supriyono, 2018). Dalam perkembangannya, Kebanggaan akan kemerdekaan yang diraih dengan perjuangan juga berarti tumbuhnya sikap lembut dan santun sebagai implementasi dari rasa syukur (Wijayanto, 2010). Sikap bermoral, bertanggungjawab dan lemah lembut yang merupakan implementasi dari nilai budaya kejuangan terwujud dalam karakter pantang menyerah dan gigih dalam berusaha pada masyarakat Yogyakarta dan masyarakat Surakarta (Zuhdi, 2014).

Perspektif teori simbol

Merujuk pada perspektif Dillistone, symbol dapat berupa apa saja yang selalu hadir dalam kehidupan manusia, yang dipandang mewakili, menggambarkan, mengungkapkan, merujuk pada, berdiri menggantikan, berhubungan dengan, menerangi, mengacu pada sesuatu: yang tertinggi dari suatu makna, realitas, cita-cita,

nilai, dan suatu keberadaan. Kehadiran simbol dengan mewakili keseluruhan tersebut membuat manusia menjadikannya acuan keseluruhan tindakan, pikiran dan perbuatannya, agar menjadi sesuai dengan segala hal yang tertinggi, sebagaimana yang diwakili oleh symbol tersebut. Artinya melalui symbol dengan segenap pemaknaan didalamnya itulah manusia mengekspresikan diri dan dengannya pula manusia membentuk identitas atau jatidirinya (Dillistone, 2002).

Raja sebagai symbol utama dalam suatu masyarakat yang berkebudayaan monarki, merepresentasikan ekspresi segala nilai luhur budaya dan membentuk jati diri keseluruhan rakyatnya, dimana keberadaannya ditengah-tengah masyarakatnya menjadikan segala nilai luhur yang disimbolkannya menjadi lebih hidup, dekat, nyata sekaligus dimanis dan berkembang. Hal ini memungkinkan implementasinya bersifat actual tanpa kehilangan esensi dan tujuan dari nilai-nilai luhur budaya tersebut, karena symbol itu sendiri hidup dan dapat menjadi pemandu, penjaga sekaligus pencegah dari terjadinya penyimpangan. Keberadaan symbol yang hidup ditengah-tengah masyarakat itupun dapat menjadi semacam wasit dari berbagai tafsir terkait nilai-nilai yang diwakilinya.

Dalam konteks Indonesia, dimana raja berada di daerah, keberadaannya menjadi penting sebagai penghubung antara identitas local dengan identitas nasional Indonesia yang terkandung dalam falsafah Pancasila. Pancasila adalah symbol identitas nasional Indonesia yang terbentuk dari saripati keragaman Indonesia yang kaya. Universalitas nilai yang terkandung didalamnya membutuhkan suatu peran dari raja daerah sebagai symbol pemersatu rakyat di daerahnya untuk dapat menghubungkan identitas local kedalam identitas nasional Indonesia. Sultan Yogyakarta dan Sunan Surakarta melalui tindak lakunya memandu rakyat menghaargai dan mengimplementasikan nilai-nilai patriotisme berupa giat dan gigih dalam berusaha, sambil berlaku santun, ramah dan menjaga keanggunan perilaku, yang kemudian menjadi ciri khas masyarakat Yogyakarta dan Surakarta. Identitas yang khas ini kemudian menjadi cara masyarakat Yogyakarta dan Surakarta dalam menterjemahkan identitas nasionalnya. Perilaku keseharian sebagai masyarakat yang gigih dalam bekerja, bangga menggunakan bahasa, berpakaian, berperilaku ramah dan santun khas Yogyakarta dan Surakarta yang bisa ditemui di Yogyakarta dan Surakarta hingga hari ini, sambil mengembangkan rasa persaudaraan dan kesetaraan terhadap rakyat daerah lain yang berbeda suku dan budaya

darinya namun tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Penerimaan masyarakat Yogyakarta dan Surakarta terhadap suku dan budaya yang berasal dari daerah lainnya dengan ramah mencerminkan kemampuan mengembangkan rasa kesetaraan dari rakyat Yogyakarta dan Surakarta dalam menjadi satu Indonesia. Hal ini sesungguhnya merupakan bukti dari keberhasilan raja dalam perannya sebagai symbol pemersatu rakyatnya, yang jika dikembangkan ditingkat nasional, akan dapat menjadi suatu strategi penguatan identitas nasional seluruh rakyat Indonesia. Adapun kelemahan dalam berlebihan menerima budaya luar yang terutama terjadi pada generasi melenial memerlukan suatu strategi di tingkat nasional, dalam membangun kesetaraan bangsa dan Negara Indonesia dengan Negara-negara di dunia. Misalnya dengan mengupayakan dan mengkampanyekan kesetaraan dalam kebernilaian budaya Indonesia dengan budaya-budaya yang ada di dunia, agar rakyat Indonesia bangga akan budaya negerinya, dan bangga untuk mengimplementasikannya dalam perilaku keseharian maupun mengenakan atribut-atribut bangsa Indonesia. Dalam Hal ini Indonesia perlu untuk mempelajari bagaimana Jepang berhasil mempromosikan budayanya, atau melihat apa dilakukan oleh Negara Korea melalui Kpopnya, misalnya.

Kemampuan mengkampanyekan kesetaraan kebernilaian budaya yang dimiliki dengan budaya – budaya dunia nampaknya berhasil dilakukan oleh Jepang, dimana hal ini menjadi kekuatan bangsa Jepang dalam memperkuat identitas nasionalnya. Masyarakat Jepang terkenal dengan rasa kebanggaannya akan budaya Jepang sendiri, dan menjadikan hal ini sebagai modal berkompetisi dengan dunia internasional. Namun nampaknya masih terdapat sisi kelam berupa tumbuh dan berkembangnya fasisme masyarakat Jepang. Perasaan unggul dari yang lain membuat Jepang pernah menjadi bangsa penjajah, dimana hal ini pada masa perang menghantarkan Jepang pada kehancurannya di perang dunia II, dan menjadi sebab ketidaksiapan Jepang menghargai kemajuan Negara lain, sebagaimana dalam kasus penolakan budaya Korea yang masuk ke negeranya dan menjadi tren dikalangan melenial Jepang saat ini.

Peran diplomatic yang di jalani oleh kaisar Akihito nampaknya diambil oleh sang kaisar dalam upaya mengatasi problematika ini. Sebagaimana diungkapkan dalam pidatonya, bahwa membangun posisi diri Jepang dengan bijaksana di dunia internasional, haruslah disertai dengan menjalin hubungan dengan tulus dengan yang lainnya. Hal ini memungkinkan rakyat Jepang untuk memulai menyeimbangkan antara

pemaknaan terhadap diri sendiri dan pemaknaan terhadap orang lain diluar dirinya yang berbeda dan memiliki makna dan nilai yang berlainan, dengan lebih setara. Hal ini tentu membutuhkan dukungan dari seluruh komponen Jepang, jika ingin tercapai apa yang dicita-citakan sang kaisar.

Kesimpulan

Dari kajian singkat ini disarikan bahwa sebagai pemilik budaya monarki yang masih potensial dalam menjadikan raja sebagai symbol pemersatu rakyatnya, kedua Negara perlu untuk saling belajar dalam upaya memberi ruang pada raja untuk berkontribusi dalam menentukan batas-batas keterbukaan dan ketertutupan negaranya. Kebudayaan yang masih terjaga ditengah-tengah masyarakat berkat system monarki yang masih bertahan, merupakan potensi dalam mendinamisasi apa yang disebut identitas nasional. Sehingga dalam merumuskan identitas nasional masing-masing Negara dapat lebih tepat dan berdaya guna bagi eksistensi Negara, kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat.

Daftar Pustaka

- Albab, Ulul. "Perbandingan Politik Indonesia dan Jepang", *Jurnal Univ. Brawijaya*, 2011.
- Dillistone, F.W. *The power of symbol*. (terjemahan) Jakarta: Gramedia, 2002.
- Dillistone, F.W. *The Power of Symbols*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Haq, Robiatul. "Penolakan Publik Jepang Terhadap Produk Budaya Korea Selatan", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Hariyono. *Sejarah dan Budaya di Indonesia*, Nomor 2, Desember 2017.
- Kang, Tae-Jun. "Japan's Growing anti-korean Sentiment", *The Diplomat*, December 30, 2014
- Mikalajunaite, Ugne. "Anti-korean wave and Far-Right Wing nationalism in Japan. Master", *Tesis*, Leiden University: BA International Studies, 2012.
- Mulyadi, Budi. "Kaisar Jepang di Era Modern", *Izumi*, Vol. 6, No. 3, 2017.
- Rofi'ah. "Efektivitas Komunikasi Antarbudaya", *Tesis*. IPB, 2012.
- Sakamoto, Taro. *Jepang dulu dan Sekarang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.

- Soekamto, Sujono. *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sugimoto, Yoshio. *An Introduction to Japanese Society third Edition*. NewYork: Cambridge University Press, 2010.
- Tsunenari, Tokugawa dan Nakamura. *Bushido as Character Education*. Japan: Echo, 2007.
- Wardani, Laksmi Kusuma. “Pengaruh Pandangan sosio Kultural Sultan Hamengkubuwana IX terhadap eksistensi Keraton Yogyakarta”, *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Vol. 25, No 1, 2012.
- Wijayanto, Andi. *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia 1945-1998*. Prisma, *Meninjau kembali pertahanan Indonesia*. Jakarta: PP3ES, Vol. 29, 2010.
- Yang, D. *Technology of empire : telecommunication and Japanese expansion in Asia 1883-1945*. Cambridge, Harvard University Asia Center, 2010.
- Zuhdi, Susanto. “Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai modalitas memperkuat pertahanan Negara”, *Jurnal Pertahanan*, Vol. 4, No 1, 2014.